

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA ANTARA
PEMBERI WARALABA DENGAN PENERIMA WARALABA
(Studi Pada Waralaba Makanan Lokal Tahu Kriuk Oslo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NOVERA

C100170249

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA ANTARA PEMBERI
WARALABA DENGAN PENERIMA WARALABA
(Studi Pada Makanan Lokal Tahu Kriuk Oslo)**

PUBLIKASI ILMIAH

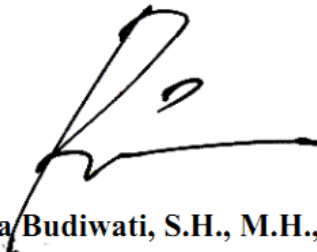
oleh:

NOVERA

C100170249

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Septarina Budiwati', with a stylized flourish at the end.

(Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN)

NIK/NIDN.244/0621085801

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA ANTARA PEMBERI
WARALABA DENGAN PENERIMA WARALABA
(Studi Pada Makanan Lokal Tahu Kriuk Oslo)**

**OLEH
NOVERA
C100170249**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 16 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.** (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Nuswardhani, S.H., S.U** (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Inayah, S.H., M.H** (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Agustus 2021

Penulis,



NOVERA

C100170249

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA ANTARA PEMBERI
WARALABA DENGAN PENERIMA WARALABA
(Studi Pada Waralaba Makanan Lokal Tahu Kriuk Oslo)**

Abstrak

Waralaba adalah sebuah usaha kerjasama bisnis yang mana didalamnya terdapat Hak atas Kekayaan Intelektual dipegang dan dimiliki oleh pemberi waralaba dan dapat digunakan oleh pihak lain atau penerima waralaba. Dalam pelaksanaan usaha waralaba kegiatannya didasarkan pada perjanjian waralaba. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai bentuk dan isi perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo dan bagaimana hubungan hukum para pihak di dalam perjanjian Waralaba tahu Kriuk Oslo. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menguji apakah bentuk dan isi serta hubungan hukum di dalam perjanjian Waralaba Tahu Kriuk Oslo telah memenuhi ketentuan dari Hukum Perjanjian dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan isi perjanjian waralaba belum memenuhi ketentuan dari pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Perjanjian Waralaba Tahu Kriuk Oslo tidak memuat seperti jenis hak kekayaan intelektual, bimbingan pelatihan kepada penerima waralaba, jangka waktu perjanjian dalam hal ini adalah waktu berakhirnya perjanjian, hak ahli waris dan tata cara perpanjangan seperti halnya ketentuan di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Hubungan hukum yang diadakan oleh kedua belah pihak telah tertuang di pasal 1 sampai pasal 3 dengan menggunakan prinsip asas kebebasan berkontrak.

Kata kunci: waralaba, perjanjian waralaba, bentuk dan isi perjanjian, hubungan hukum

Abstract

Franchising is a business cooperation business in which Intellectual Property Rights are held and owned by the franchisor and can be used by other parties or the franchisee. In the implementation of a franchise business, its activities are based on a franchise agreement. In this study, the author examines the form and content of the Tahu Kriuk Oslo franchise agreement and how the legal relationship between the parties in the Tahu Kriuk Oslo Franchise agreement is. The research method used by the author to examine the Tofu Kriuk Oslo franchise agreement is to use a normative juridical research method, namely to examine whether the form and content as well as the legal relationship in the Tahu Kriuk Oslo Franchise agreement have complied with the provisions of the Agreement Law and Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise. The results of this study indicate that the form and content of the franchise agreement have not met the provisions of Article 5 of Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise. The Tofu Kriuk Oslo Franchise Agreement does not contain the types of intellectual property rights, training guidance to franchisees, the term of the agreement in this case is the expiration date of the agreement, the rights of heirs and the procedure for extension as well as the provisions in Article

5 of Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise and legal relations held by both parties have been stated in articles 1 to 3 using the principle of freedom of contract.

Keywords: franchise, franchise agreement, legal relationship

1. PENDAHULUAN

Majunya era globalisasi dewasa ini menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat pesat. Terkhususnya di bidang kerjasama bisnis. Adanya bentuk kerjasama bisnis ini ditandai dengan banyaknya muncul usaha-usaha baru yang didirikan di Indonesia. Usaha-usaha baru di bidang perdagangan dan jasa yang sedang marak berkembang saat ini salah satunya yakni usaha waralaba (Widodo, 2016). Usaha Waralaba adalah sistem usaha bisnis yang memiliki ciri tertentu di bidang perdagangan atau jasa, maupun produk dan memiliki identitas perusahaan (logo, desain, merek). Pengertian waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang ataupun badan usaha yang memiliki sistem bisnis dan ciri khas usaha yang bertujuan untuk mendistribusikan atau memasarkan barang dan atau jasa yang terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan maupun digunakan pada pihak lain yang berlandaskan pada perjanjian waralaba.

Dalam menjalankan usaha waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian waralaba. Pada perjanjian waralaba tersebut terdapat dua pihak yang terlibat. Pihak pertama disebut sebagai pemberi waralaba yakni berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba adalah;

“orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.”

dan pihak kedua disebut sebagai penerima waralaba sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba adalah;

“perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba”

Perkembangan bisnis usaha waralaba di Indonesia semakin digemari oleh masyarakat, sehingga dapat terlihat bahwa usaha waralaba ini meningkat setiap

tahunnya. Mengacu pada data International Franchise Association (AFI) tahun 2016 perolehan omzet waralaba di Indonesia mencapai hingga 172 Triliun. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan omzet hingga 10%. Namun di tahun ini di seluruh dunia sedang dilanda wabah pandemicovid-19 tak terkecuali Negara Indonesia pun juga ikut terdampak yang artinya adalah wabah pandemicovid-19 juga ikut mempengaruhi keadaan sektor usaha waralaba di Indonesia, para pelaku usaha waralaba menyadari bahwa adanya penurunan omzet penjualan waralaba yang diakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya para pelaku usaha memberikan potongan harga untuk dapat menarik kembali daya masyarakat yang dimana usaha inipun membuahkan hasil yaitu omzet penjualan waralaba mengalami peningkatan sebesar 10% (sepuluh persen) Pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha waralaba terus mengalami peningkatan omzet dari tahun ke tahun. Banyaknya usaha yang menggunakan sistem waralaba, dinilai lebih mendatangkan banyak keuntungan bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba.

Hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan suatu hubungan timbal balik (Idrus, 2017). Hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba juga diatur dalam perjanjian waralaba yakni dalam bagian hak dan kewajiban para pihak. Hal ini berarti, terdapat keterikatan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba sehingga keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang tercantum di perjanjian waralaba memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Gumanti, 2012). Perjanjian waralaba tersebut menjadi dasar hukum untuk menjalankan usaha waralaba serta perlindungan hukum bagi para pihak (Aidi dan Farida, 2019). Apabila diantara salah satu pihak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian waralaba maka salah satu pihak lainnya dapat menuntutnya berdasarkan ketentuan yang telah tertulis di dalam perjanjiannya. Salah satu usaha waralaba yang sedang mengembangkan bisnisnya saat ini adalah waralaba Tahu Kriuk Oslo. Waralaba Tahu Kriuk Oslo merupakan usaha waralaba bidang makanan yang menyajikan banyak varian rasa tahu yang krispi berasal dari kota asalnya yakni di Kota Solo. Tahu kriuk Oslo bukan hanya dibuka di kota Solo saja tetapi banyak gerai yang tersebar di kota-kota lainnya

seperti Semarang, Boyolali, Kartasura, Solo, Ngawi, Madiun yang dimana dalam pelaksanaan usaha waralabanya ia menggunakan perjanjian waralaba sebagai dasar untuk menjalankan bisnis waralaba

Pada pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba menjelaskan bahwa perjanjian waralaba, setidaknya memuat jangka waktu perjanjian. Oleh karena itu, hal ini sangatlah penting guna untuk mengakhiri hubungan hukum bagi kedua belah pihak sebagaimana tercantum berdasarkan kesepakatan. Namun dalam perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo pemberi waralaba tidak mencantumkan mengenai jangka waktu berakhirnya perjanjian waralaba yang berakibat perjanjian waralaba tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba dalam jangka waktu tertentu memberikan ijin atau lisensi kepada penerima waralaba untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas pemberi waralaba dalam wilayah tertentu. Sehingga seharusnya pemberi waralaba mencantumkan jangka waktu dalam perjanjian waralaba agar tidak terjadi sengketa hukum dikemudian hari antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam tugas akhir berjudul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba Antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba (Studi Pada Waralaba Makanan Lokal Tahu Kriuk Oslo)”**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan peneltian dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk dan isi perjanjian waralaba? Bagaimana hubungan hukum antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba?

2. METODE

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis meliputi: a. metode pendekatan yuridis normatif b. jenis penelitian berupa deskriptif c. lokasi penelitian bertempat di waralaba Tahu Kriuk Oslo Bibisan Luhur, Nusukan, Surakarta d. jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder e. metode pengumpulan data yakni dengan cara Studi kepustakaan dalam penelitian ini yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari sekaligus memahami berbagai

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.f. metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Waralaba Tahu Kriuk Oslo

Persetujuan perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dituangkan di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 yang dibuat secara tertulis yang terdiri dari Pasal 1 mengenai ketentuan umum, pasal 2 mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dan pasal 3 mengenai maksud baik. Hal ini telah sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Mengenai perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo yang diadakan oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian ketentuan di pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yang pertama mengenai kesepakatan, Pengertian kesepakatan adalah persesuaian suatu kehendak kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya di dalam perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman kesepakatan adalah syarat untuk menyetujui suatu kehendak yang ditentukan oleh kedua pihak yang tidak mengandung unsur-unsur penipuan, kekeliruan dan paksaan (Badruzaman, 1980). Di dalam perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo diketahui bahwa kedua belah pihak antara Tuan AAD yang bertindak sebagai pemberi waralaba dengan Tuan E sebagai penerima waralaba telah memberikan kesepakatannya dibuktikan dengan adanya tanda tangan di dalam perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo.

Syarat subjektif yang kedua mengenai kecakapan kedua belah pihak, menurut pasal 1329 KUHPerdara menjelaskan bahwa dasarnya semua orang mampu membuat perjanjian, kecuali mereka yang dianggap tidak mampu menurut undang-undang. Kriteria usia dewasa menurut pasal 330 ayat (1) KUHPerdara yaitu telah berusia 21 tahun dan atau telah melakukan perkawinan (Salim H.S, 2003). Di dalam perjanjian waralaba tahu Kriuk Oslo, kedua belah pihak cakap

dalam melakukan suatu perjanjian hal ini dibuktikan dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) Tuan AAD dan Tuan E.

Syarat objektif mengenai objek tertentu, merupakan sesuatu hal yang diperjanjikan di dalam suatu perjanjian. Untuk menjadi objek tertentu di dalam perjanjian pasal 1333 KUHPdata telah menjelaskan bahwa setidaknya objek tersebut dapat ditentukan jenisnya. Untuk jumlah objek yang diperjanjikan tidak ditentukan jenisnya namun dapat dihitung jumlahnya. Syarat objektif di dalam perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo adalah Penerima waralaba membeli 1 Paket Usaha waralaba Tahu Kriuk Oslo yang dimana pendirian gerai tersebut berlokasi di Bibis luhur, Nusukan, Surakarta

Syarat kausa yang halal, menurut pasal 1335 KUHPdata yang menyatakan bahwa adanya perjanjian tidak ada sebab atau ditemukan sebab yang palsu maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, Maka dari itu dengan adanya syarat kausa yang halal, dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, asusila, dan ketertiban umum (Bukido, 2008). Syarat kausa yang halal telah dituangkan di dalam perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo ialah penjualan waralaba berupa makanan tahu kriuk yang dimana hal ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan, asusila dan ketertiban umum

Berdasarkan hasil dan pembahasan uraian diatas mengenai bentuk dan isi perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo, penulis meneliti bahwa perbuatan kedua belah pihak dalam mengikatkan dirinya satu sama lain untuk mencapai sebuah kesepakatan di dalam perjanjian Tahu Kriuk Oslo telah sesuai dengan pasal 1313 KUHPdata dan sarat sah perjanjian

Mengenai isi perjanjian waralaba yang harus dimuat didalam perjanjian waralaba telah diatur Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba setidaknya memuat: nama dan alamat para pihak; jenis Hak Kekayaan Intelektual; kegiatan usaha; hak dan kewajiban para pihak; bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; wilayah usaha; jangka waktu perjanjian; tata cara pembayaran imbalan; kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris; penyelesaian sengketa; dan tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Hasil analisis mengenai Bentuk dan isi perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo ternyata belum sesuai dengan ketentuan dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, sebab di dalam Perjanjian Waralaba Tahu Kriuk Oslo hanya memuat nama dan alamat kedua belah pihak, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pemassaran yang diberikan oleh pemberi waralaba, wilayah usaha, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan dan perubahan kepemilikan, penyelesaian sengketa, tata cara pengakhiran dan pemutusan perjanjian. Perjanjian Waralaba Tahu Kriuk Oslo tidak memuat klausula seperti jenis hak kekayaan intelektual, bimbingan pelatihan kepada penerima waralaba, jangka waktu perjanjian dalam hal ini adalah waktu berakhirnya perjanjian, hak ahli waris, serta tata cara perpanjangan perjanjian seperti halnya ketentuan di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

Akibat hukum perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo yang diadakan oleh para pihak berdasarkan pasal 1338 KUHPdata adalah perjanjian waralaba itu mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mana wajib dilaksanakan secara keseluruhan tanpa terkecuali dan dilaksanakan dengan penuh itikad yang baik

3.2 Hubungan Hukum Antara Pemberi Waralaba Dengan Penerima Waralaba Di Dalam Perjanjian Waralaba Tahu Kiruk Oslo

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang melahirkan hubungan hukum kedua belah pihak, dimana di satu pihak mendapatkan haknya, di satu pihak lain wajib untuk melaksanakan kewajibannya. Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan anatara dua pihak atau lebih subjek hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain (Soeroso, 2011).

Dalam membuat perrjanjian pada umumnya dilakukan oleh subyek hukum terdiri orang atau badan hukum. Apabila dikaitkan dengan Perjajian waralaba Tahu Kriuk Oslo ini yang dimana perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan hukum kedua belah pihak yaitu antara Tuan AAD sebagai pemberi waralaba dan tuan E sebagai penerima waralaba yang mana

dalam hal ini mereka berdua bertindak sebagai subyek hukum yang saling mengikatkan dirinya dan menimbulkan hubungan hukum

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesepakatan perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dituangkan di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 yang dibuat secara tertulis. Hal ini telah sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdara. Mengenai perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo yang diadakan oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur di pasal 1320 KUHPerdara. Bentuk dan isi perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo belum sesuai dengan ketentuan dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Akibat hukum perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo yang diadakan oleh para pihak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara adalah perjanjian waralaba itu mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mana wajib dilaksanakan secara keseluruhan tanpa terkecuali dan dilaksanakan dengan penuh itikad yang baik

Hubungan hukum kedua belah pihak yang terdapat di Perjanjian Waralaba Tahu Kriuk Oslo antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba telah tertulis di pasal 1,2 dan 3. Hubungan hukum adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran seperti berikut: Kedua belah pihak dalam mengadakan suatu perjanjian hendaknya cermat untuk mengetahui isi perjanjian yang dibuat agar dapat meminimalkan resiko atau agar tidak terjadi resiko dikemudian hari.

Pentingnya menulis jenis hak kekayaan intelektual di dalam perjanjian waralaba adalah sebagai bentuk upaya untuk melindungi jenis hak atas kekayaan intelektual pada waralaba Tahu Kriuk Oslo agar tidak terjadi pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Sehingga sebaiknya menyebutkan jenis hak kekayaan

intelektual yang dimiliki di dalam perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo dan apabila produk waralaba Tahu Kriuk Oslo belum terdaftar di dirjen HKI maka penulis menyarankan untuk segera mendaftarkannya ke dirjen HKI

Pihak pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba hendaknya menuliskan mengenai pemberian pelatihan berwirausaha kepada penerima waralaba agar usaha yang dijalankan semakin berkembang dengan baik

Jangka waktu perjanjian merupakan hal yang penting guna untuk mengetahui masa jangka waktu berlakunya perjanjian, dalam membuat perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo sebaiknya jangka waktu dituliskan secara lengkap mengenai kapan perjanjian itu disepakati dan berakhirnya perjanjian. sehingga perjanjian yang dibuat secara lengkap akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak antara pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba di dalam klausula perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo dapat menambahkan klausula seperti penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Surakarta apabila penyelesaian sengketa kedua belah pihak melalui musyawarah tidak mencapai mufakat

DAFTAR PUSTAKA

Aidi, Zil dan Farida, Hasna. (2019). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Cendekia Hukum Vol 4, No 2, Maret 2019*.

Badruzaman, Mariam Darus. (1980). *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumi.

Bukido, Rosdalina. (2008). Urgensi Dalam Perjanjian Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 06 No. 01, 2008*.

Gumanti, Retna. (2012). Syarat sahnya Perjanjian. *Jurnal Pelangi Ilmu Vol 05, No 01*.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180829/12/832782/bisnis-waralaba-kian-gurih-kemendag-longgarkan-aturan> diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 22.34 wib

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190822/12/1139761/industri-waralaba-pertumbuhanditarget-10-tahun-ini-segmen-mamin-jadi-penopang> diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 22.40 wib

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200828/12/1284428/omset-bisnis-waralaba-diperkirakan-naik-pada-kuartal-iii2020> diakses pada tanggal 13 Maret 2021 Pukul 21.00 WIB

Idrus, Norman Syarar. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis Vol 4 No 1, Juni 2017*.

R. Soeroso. (2011). *Pegantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, H.S, (2003), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.

Widodo, Selamat. (2016). Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba. *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No 1 Januari 2016*.